

019.07.1500.247232
BALAI RISET DAN STANDARDISASI
INDUSTRI BANJARBARU

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019
(*Audited*)



Jalan Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru 70711
Telp. (0511) 4774861, 4772461 Fax. (0511) 4772115
baristand.banjarbaru@kemenperin.go.id
www.baristandbanjarbaru.kemenperin.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, April 2020
Kepala Baristand Industri
Banjarbaru



Budi Setiawan, ST., MM
NIP 19800804 200312 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	39
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	58
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	69
F. Pengungkapan Penting Lainnya	73
VI. Lampiran dan Daftar	77

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU
JALAN PANGLIMA BATUR BARAT No.02 KOTA BANJARBARU
Telp. (0511) 4774861-4772115,4772461, Fax. (0511)4772115**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, April 2020
Kepala Baristand Industri
Banjarbaru



Budi Setiawan, ST., MM
NIP 19800804 200312 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.190.877.249 atau mencapai 108,74 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.934.445.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.902.686.980 atau mencapai 99,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.992.240.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.298.283.679 yang terdiri dari: Aset Lancar (neto) sebesar Rp75.848.381; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.298.283.679; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp379.565.403 dan Rp28.994.566.675.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.135.965.060, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.210.471.409 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.074.506.349. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp54.917.589 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.019.588.760.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp32.614.379.686 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.019.588.760 dan Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp2.043.534.000 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.443.309.731 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp28.994.566.657.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% thd Angg	31 DESEMBER 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2,934,445,000	3,190,877,249	108.74	2,961,192,127
JUMLAH PENDAPATAN		2,934,445,000	3,190,877,249	108.74	2,961,192,127
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7,907,376,000	7,853,362,352	99.32	7,949,780,033
Belanja Barang	B.4	5,722,523,000	5,687,568,628	99.39	4,763,572,683
Belanja Modal	B.5	362,341,000	361,756,000	99.84	384,312,500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		13,992,240,000	13,902,686,980	99.36	13,097,665,216

II. NERACA

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.8	4,484,581	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	71,363,800	75,396,850
Jumlah Aset Lancar		75,848,381	75,396,850
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16,329,514,000	18,373,048,000
Peralatan dan Mesin	C.15	21,597,913,941	20,514,087,141
Gedung dan Bangunan	C.16	7,753,875,000	7,753,875,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	131,718,500	131,718,500
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(16,514,737,762)	(13,891,424,595)
Jumlah Aset Tetap		29,298,283,679	32,881,304,046
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	3,120,633,300	3,120,633,300
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(3,120,633,300)	(3,120,633,300)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		29,374,132,060	32,956,700,896
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	22,891,653	17,198,710
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	356,673,750	325,122,500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		379,565,403	342,321,210
JUMLAH KEWAJIBAN		379,565,403	342,321,210
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	28,994,566,657	32,614,379,686
JUMLAH EKUITAS		28,994,566,657	32,614,379,686
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29,374,132,060	32,956,700,896

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lain	D.1	3,135,965,060	2,851,731,429
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		3,135,965,060	2,851,731,429
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	7,843,575,647	7,916,746,069
Beban Persediaan	D.3	1,472,471,650	1,333,379,800
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,429,155,242	2,029,806,546
Beban Pemeliharaan	D.5	854,485,983	729,569,850
Beban Perjalanan Dinas	D.6	987,469,720	805,599,431
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,623,313,167	2,607,153,940
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		16,210,471,409	15,422,255,636
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13,074,506,349)	(12,570,524,207)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar			19,982,140
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			-
Defisit Selisih Kurs			-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		61,103,089	21,295,248
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6,185,500)	(4,131,250)
JUMLAH KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		54,917,589	37,146,138
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(13,019,588,760)	(12,533,378,069)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	32,614,379,686	34,147,784,666
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13,019,588,760)	(12,533,378,069)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	(2,043,534,000)	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	11,443,309,731	10,999,973,089
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(3,619,813,029)	(1,533,404,980)
EKUITAS AKHIR	E.6	28,994,566,657	32,614,379,686

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Organisasi dan tata kerja entitas diatur dalam Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Tugas pokok dan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 58/M-IND/PER/6/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.*

Sedangkan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Nomor : 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah :

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,

- peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri
- b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang riset/litbang
 - c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk
 - d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset dan pengembangan dan
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab kepada Kepala BPPI, Baristand Industri Banjarbaru juga telah menetapkan visi, misi, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Banjarbaru 2015-2019.

Visi yang telah ditetapkan yaitu **“Menjadi pusat riset yang unggul dalam pengolahan hasil hutan kayu, non kayu dan potensi lainnya serta layanan jasa di bidang industri yang terpercaya”**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan juga misi yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dan standardisasi di bidang pengolahan hasil kayu, non kayu, dan potensi lainnya.

2. Melakukan inovasi dan penguasaan teknologi di bidang pengolahan hasil kayu, non kayu dan potensi lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing IKM.
3. Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas di bidang pengujian, konsultasi teknologi produk/proses, pelatihan teknis operasional, standardisasi, sertifikasi, penanggulangan pencemaran industri dan informasi teknologi.
4. Melakukan kemitraan dengan industri, lembaga litbang, perguruan tinggi dan lembaga lain.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan

seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 Unaudited sesuai mekanisme yang berlaku.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/d dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Mulai tahun 2015 Pemerintah rnengimplementasikan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruaI. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hai ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruaI pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru* telah mengadakan 7 (tujuh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian KPA, perubahan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan guna mendukung kemajuan program Making Indonesia 4.0 yang telah dirancang oleh Kementerian Perindustrian RI. Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan pada anggaran belanja pegawai sebagai berikut:

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	2,934,445,000	2,934,445,000
Jumlah Pendapatan	2,934,445,000	2,934,445,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,439,556,000	7,907,376,000
Belanja Barang	5,722,523,000	5,722,523,000
Belanja Modal	362,341,000	362,341,000
Jumlah Belanja	13,524,420,000	13,992,240,000

Realisasi

Pendapatan

Rp3.190.877.249

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.190.877.249 atau mencapai 108,08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.934.445.000. Pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru terdiri dari:

- a. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- b. Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
- c. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- d. Pendapatan Jasa Lainnya
- e. Pendapatan Lain-lain

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Rp -	Rp 348,810	
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	Rp 2,874,445,000	Rp 3,034,037,500	
Pengembalian Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi		Rp 1,870,000	
Jumlah Netto Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi		Rp 3,032,167,500	105.48
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 60,000,000	Rp 108,000,000	180.00
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp -	Rp 26,500,000	
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 23,360,939	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp 500,000	
Jumlah	Rp 2,934,445,000	Rp 3,190,877,249	108.8

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513) bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) disebabkan adanya setoran SSBP atas sewa rumah dinas sebesar Rp34.881 per bulan atas nama wajib setor Budi Setiawan, ST., MM pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019, dengan total sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp348.810.

Realisasi Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi (42528) didapat dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan

Standardisasi di Bidang Industri (425283) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp3.034.037.500 atau 108,8 persen dari estimasi pendapatan Rp2.874.445.000. Rincian realisasi pendapatan ini sampai 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan Pengujian sebesar Rp.2.942.167.500 dan Pendapatan Layanan Sertifikasi (LS-Pro) sebesar Rp.90.000.000.

Realisasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542) didapat dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp108.000.000 atau 180,00 persen dari estimasi pendapatan Rp60.000.000. Pendapatan ini diperoleh melalui Layanan Pelatihan yaitu Pelatihan Mikrobiologi yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2019. Training Pengambilan Sampel Air Limbah yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2019 di Baristand Industri Banjarbaru dengan total jumlah peserta 21 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa perusahaan di daerah Kalimantan Selatan. Pelatihan ISO 9001:2015 yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Agustus 2019 dengan total peserta dari eksternal sebanyak 6 orang. Pelatihan Analisa pengujian AMDK sesuai SNI yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Juli 2019 dengan total peserta dari eskternal sebanyak 5 orang. Serta Pelatihan Training Pengambilan Sampel Air Limbah yang dilaksanakan pada tanggal 16-18 Desember 2019 dengan total peserta dari eskternal sebanyak 4 orang.

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya (42569) didapat dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692)

sebesar Rp26.500.000. Pendapatan ini terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian antara pihak Baristand Industri Banjarbaru dan Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya No. 080/UN24.10/LL/2019 tanggal 12 Maret 2019.

Realisasi Pendapatan Lain-lain bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp23.360.939. Rincian pendapatan tersebut terdiri dari:

- a. Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2018 sebesar Rp12.505.939.
- b. Pengembalian Tunjangan Fungsional Peneliti a.n. Ir. Lies Indriati antara bulan November 2017 sd Maret 2018 sebesar Rp8.700.000.
- c. Pengembalian Tunjangan Fungsional Perencana a.n. Anhar Firdaus, ST antara bulan November-Desember 2018 sebesar Rp280.000.
- d. Pengembalian Tunjangan Fungsional Pedal a.n. Nurdin, S.Hut antara bulan Oktober 2017 sd Desember 2018 sebesar Rp1.875.000.

Pengembalian Pendapatan sebesar Rp1.870.000 pada akun 425283 disebabkan oleh kelebihan pembayaran karena kelebihan pembuatan billing untuk pembayaran pengujian yang terjadi pada bulan Maret dan Juli 2019.

Pendapatan Anggaran lain-lain (425999) sebesar Rp 500.000 diperoleh dari biaya praktik kuliah / kunjungan belajar mahasiswa Poltekkes Banjarmasin.

Realisasi Pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp229.685.122 atau 7,76 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018. Meskipun target PNBPN pada TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018, namun capaian realisasi pendapatan mampu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan jumlah sampel pengujian, jumlah peserta pelatihan, dan penerimaan pendapatan jasa lainnya.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Rp 348,810	Rp 53,178,929	-99.34
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	Rp 3,032,167,500	Rp 2,849,630,000	6.41
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 108,000,000	Rp 46,000,000	134.78
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp 26,500,000	Rp 500,000	5200.00
Pendapatan Lain-lain	Rp 23,360,939	Rp 11,883,198	96.59
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 500,000	Rp -	0.00
Jumlah	Rp 3,190,877,249	Rp 2,961,192,127	7.76

*Realisasi
Belanja Negara
Rp13.902.686.9
80*

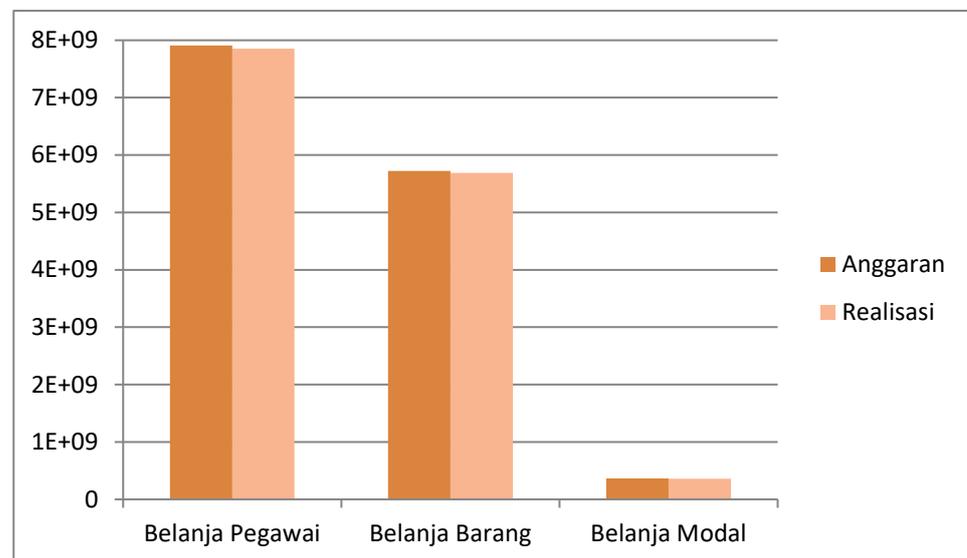
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.902.686.980 atau 99,36 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13.992.240.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 DESEMBER 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,907,376,000	7,853,362,352	99.32
Belanja Barang	5,722,523,000	5,687,568,628	99.39
Belanja Modal	362,341,000	361,756,000	99.84
Total Belanja Kotor	13,992,240,000	13,902,686,980	99.36
Jumlah	13,992,240,000	13,902,686,980	99.36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Rp.000) dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja Baristand Industri Banjarbaru untuk tahun 2019 adalah 99,36%. Secara keseluruhan bisa dikatakan realisasi untuk Tahun 2019 sudah bagus, karena telah mencapai hampir 100% dari keseluruhan PAGU.

Dibandingkan dengan periode Tahun 2018, Realisasi Belanja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,15 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan antara lain Pengadaan belanja barang untuk mendukung realisasi rencana strategis 2015-2019 dalam hal

ini juga mendukung realisasi rencana aksi perjanjian kinerja TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,853,362,352	7,949,780,033	(1.21)
Belanja Barang	5,687,568,628	4,763,572,683	19.40
Belanja Modal	361,756,000	384,312,500	(5.87)
Jumlah	13,902,686,980	13,097,665,216	6.15

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp7.853.362.352

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.853.362.352 dan Rp7.949.780.033. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dari TA 2018. Penurunan ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat 5 orang pegawai yang pensiun di tahun 2019.
2. Adanya mutasi pegawai dari Jabatan Fungsional Tertentu menjadi Jabatan fungsional umum yang berpengaruh terhadap nilai tunjangan jabatan.
3. Ada mutasi masuk 1 pegawai namun juga ada mutasi pindah 2 orang pegawai, sehingga secara keseluruhan terdapat pengurangan jumlah pegawai di Baristand

Industri Banjarbaru pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,022,214,492	4,315,384,635	(6.79)
Belanja Lembur	20,509,000	20,718,000	(1.01)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3,812,633,071	3,615,888,348	5.44
Jumlah Belanja Kotor	7,855,356,563	7,951,990,983	(1.22)
Pengembalian Belanja Pegawai	(1,994,211)	(2,210,950)	(9.80)
Jumlah	7,853,362,352	7,949,780,033	(1.21)

Belanja Barang
Rp5.687.568.628

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.687.568.628 dan Rp4.763.572.683. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 mengalami peningkatan 19,4 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2018.

Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja jasa, dan belanja perjalanan dalam negeri sepanjang Tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan beberapa harga barang-barang.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,039,901,847	884,456,411	17.58
Belanja Barang Non Operasional	717,193,350	664,262,359	7.97
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,448,267,750	1,233,849,200	17.38
Belanja Jasa	651,635,778	475,390,632	37.07
Belanja Pemeliharaan	843,600,183	700,014,650	20.51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	987,469,720	805,599,431	22.58
Jumlah Belanja Kotor	5,688,068,628	4,763,572,683	19.41
Pengembalian Belanja Barang	(500,000)	-	-
Jumlah	5,687,568,628	4,763,572,683	19.40

Belanja Modal
Rp361.756.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Triwulan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp361.756.000 dan Rp384.312.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,87 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal bahan baku peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361,756,000	306,632,500	17.98
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	2,970,000	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	74,710,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	361,756,000	384,312,500	-5.87
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	361,756,000	384,312,500	-5.87

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp361.756.000 dan Rp306.632.500. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami peningkatan 17,98 persen dibanding TA 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal peralatan dan mesin terutama pembelian alat instrumentasi laboratorium pengujian yang memang memerlukan pembaharuan alat, pembelian peralatan penelitian, dan penambahan perlengkapan peralatan perkantoran seperti Laptop, PC, AC, dan yang lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361,756,000	306,632,500	17.98
Jumlah Belanja Kotor	361,756,000	306,632,500	17.98
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	361,756,000	306,632,500	17.98

B.5.2 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Bahan Baku Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.970.000. Realisasi Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan karena memang tidak ada belanja modal bahan baku yang di rencanakan pada tahun 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Bahan Baku Peralatan
dan Mesin*

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	2,970,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	2,970,000	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	2,970,000	0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp74.710.000. Jika dibandingkan, realisasi TA 2019 mengalami penurunan dari

realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penambahan dan pengembangan gedung dan bangunan pada TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	74,710,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	74,710,000	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	74,710,000	0.00

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena kas yang dikuasai dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca dengan bukti NTPN nomor 757D93CIE6AK9U43, CFD908N3D5OUNU23, dan 433D52G4UBO7SU0K. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	30 Desember 2019	31 Desember 2018
BNI 1946 Cab Banjarbaru No. 0081308816	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi belum di GUP kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, adalah masing-masing sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah disetorkan ke Kas Negara. Saldo uang tunai tidak ada lagi dikarenakan pembayaran jasa sudah dilakukan melalui sistem *e-billing* sehingga langsung disetor ke Kas Negara (PNBP). Rincian Kas di

Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
BNI 46 Cab. Banjarbaru No.0081309343	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang

C.4 Piutang PNBP

*PNBP
Rp.0*

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNBP (kotor/gross) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan

namun belum diselesaikan pembayarannya beserta penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Piutang PNBPN tidak muncul lagi setelah diberlakukannya peraturan bahwa pembayaran wajib dilunasi sebelum jasa terhadap pelayanan dimulai pengerjaannya. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPN

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang PNBPN	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1			-
2		-	
Jumlah		-	-

Bagian **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*Lancar TPA
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar**

*Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			-

Belanja

Dibayar di

Muka

Rp4.484.581

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp4.484.581 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Dibayar di Muka	4,484,581	-
Jumlah	4,484,581	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan **C.10 Persediaan**

Rp71.363.800 Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp71.363.800 dan Rp75.396.850.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018*

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	52,672,350	39,396,950
Barang untuk Pemeliharaan	11,409,450	9,633,450
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	7,282,000	26,366,450
Jumlah	71,363,800	75,396,850

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Debitur	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Debitur	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Tanah

C.14 Tanah

Rp16.329.514.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.329.514.000 dan Rp18.373.048.000. Terdapat penurunan aset tanah sebesar Rp2.043.534.000 pada Tahun 2019 karena dilakukan revaluasi atas revaluasi aset yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, hasil revaluasi yang dilaksanakan oleh DJKN dan KPKNL pada tahun 2019 menyatakan ada kelebihan nilai revaluasi yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga diperlukan koreksi nilai aset tanah agar nilai yang disajikan pada laporan keuangan telah akurat, andal, dan wajar.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	18,373,048,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset tetap	(2,043,534,000)
Saldo per 31 Desember 2019	16,329,514,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3801 m2	Karet Indah, Banjarbaru	2,773,210,000
2	446 m2	Jl. Ir. PM Noor No.9, Banjarbaru	1,072,808,000
3	7196 m2	Jl. Panglima Batur Barat No.2, Banjarbaru	12,483,496,000
Jumlah			16,329,514,000

Semua tanah, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh Baristand Industri Banjarbaru.

*Peralatan
dan Mesin
Rp21.597.9
13.941*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp21.597.913.941 dan Rp20.514.087.141. Berikut adalah rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	20,514,087,141
Mutasi tambah:	
Pembelian	352,326,800
Hibah Barang	0
Reklasifikasi Masuk	0
Transfer Masuk	731,500,000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	0
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 September 2019	21,597,913,941
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(14,446,079,061)
Nilai Buku per 31 Desember Juni	7,151,834,880

Mutasi tambah pada nilai Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebagai berikut:

- Pembelian berupa :

No	BAST	Nama Alat	Jumlah	Nilai (Rp) Per Unit/Paket/Jenis
1	063/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/III/2018 Tanggal 28 Maret 2019	Meja Kerja	2 Unit	2.035.000
2	-sda-	Lemari Besi Arsip	1 unit	2.475.000
3	039/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/III/2018 Tanggal 18 Maret 2019	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Jenis	17.531.250

4	085/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/IV/2018 Tanggal 26 April 2019	Portable Conductivity Meter	1 Unit	18.590.000
5	-sda-	Dissolved Oxygen Meter	1 Unit	17.380.000
6	051/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/III/2018 Tanggal 25 Maret 2019	AC 2 PK Dual Inverter	3 Unit	9.232.850
7	-sda-	AC 1 PK Dual Inverter	4 Unit	4.823.500
8	127/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/V/2018 Tanggal 27 Mei 2019	Desikator	2 Unit	1.500.400
9	-sda-	Timbangan Analitik	1 Unit	1.013.400
10	131/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/V/2018 Tanggal 27 Mei 2019	Mesin Molen Mini	1 Unit	14.999.600
11	138/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2019	Apple MacBook Air	1 Unit	15.117.500
12	-sda-	HP All-in-One 20- C414d	1 Unit	5.011.000
13	-sda-	Panasonic KX- TES824	1 Unit	8.146.000
14	161/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2019	Spektrofotometer	1 Jenis	198.000.000

- Transfer masuk berupa :

No	BAST	Nama Alat	Jumlah	Nilai (Rp) Per Unit/Paket/Jenis
1	3569/BPPI.1/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019	Peralatan Lab Uji berupa SoxRoc Extraction Unit 6 Position	1 Unit	491.700.000
		Horizontal Laminar Air Flow	1 Unit	239.800.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Rp7.753.875.000

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.753.875.000 dan Rp7.753.875.000 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	7,753,875,000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	7,753,875,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(2,068,658,701)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5,685,216,299

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan Irigasi **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Rp0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak ada

mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan, adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 30 September 2019	0

*Aset Tetap
Lainnya
Rp131.718.
500*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp131.718.500 dan Rp131.718.500. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya ini untuk periode Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	131,718,500
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	131,718,500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	131,718,500

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tahun

Anggaran 2019 ini tidak ada penambahan nilai gedung dan bangunan.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

(Rp16.514.7

37.762)

C. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing (Rp16.514.737.762) dan (Rp13.891.424.595). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	21,597,913,941	14,446,079,061	7,151,834,880
Gedung dan Bangunan	7,753,875,000	2,068,658,701	5,685,216,299
Aset Tetap Lainnya	131,718,500	-	131,718,500
Jumlah	29,483,507,441	16,514,737,762	12,968,769,679

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0		
Jumlah	0		

*Aset Lain-
Lain
Rp3.120.633.
300*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp3.120.633.300 dan Rp3.120.633.300 . Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas atau Aset Tetap yang Tidak Digunakan. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	3,120,633,300
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2019	3,120,633,300
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2019	(3,120,633,300)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

Saldo per 31 Desember 2019 adalah aset tetap yang telah diubah statusnya menjadi Aset Lain-Lain berupa alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat komputer serta peralatan proses/produksi yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp3.120.633.300.

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan pada Aset Lain-Lain pada periode Tahun 2019. Pihak Baristand Industri Banjarbaru telah melakukan dua kali lelang terhadap asset lain-lain, pertama pada Bulan Oktober Tahun 2018 namun barang tidak terjual dikarenakan pemenang lelang mengundurkan diri, kedua pada Bulan Mei Tahun 2019 tetapi tidak ada peminat terhadap barang yang dilelang. Dikarenakan telah berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan oleh Kanwil DJKN, maka perlu dilakukan usulan kembali surat persetujuan penjualan BMN atas barang yang akan dilelang sebelum diusulkan proses lelangnya ke Kantor KPKNL.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar (Rp3.120.633.300) sehingga diperoleh Nilai Buku per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada Lampiran Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
(Rp3.120.633
.300)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing (Rp3.120.633.300) dan (Rp3.120.633.300). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	3,120,633,300	(3,120,633,300)	0
Jumlah	3,120,633,300	(3,120,633,300)	0

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp22.891.6
53

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp22.891.653 dan Rp17.198.710. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga ini meliputi :

- Tagihan listrik dan telepon, bulan Desember 2019
- Rapel Kekurangan gaji Bulan oktober - nopember 2019 yang belum dibayarkan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20,963,291	Tagihan Listrik dan Telepon
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	1,928,362	Rapel Kekurangan gaji Bulan oktober - nopember 2019
Total	22,891,653	

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp356.673.
750

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp356.673.750 dan Rp325.122.500 . Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum selesai pengerjaannya dan belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa layanan pengujian dan Sertifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Diterima Dimuka	356,673,750	Pendapatan Diterima Dimuka dari Jasa Pengujian dan Sertifikasi sebanyak 201 transaksi berdasar SPJPT
Total	356,673,750	

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada Lampiran Keuangan ini.

Beban yang **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

*Masih
Harus
Dibayar
Rp0*

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas **C.28 Ekuitas**

*Rp28.994.5
66.657*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.994.566.657 dan Rp32.614.379.686. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.3.135.965.06

0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.135.965.060 dan Rp2.851.731.429. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN JENIS PENDAPATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	348,810	313,929	11.11
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	3,000,616,250	2,804,917,500	6.98
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	108,000,000	46,000,000	134.78
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	26,500,000	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	500,000	-	-
Jumlah Pendapatan	3,135,965,060	2,851,731,429	9.97

Selisih antara Pendapatan LO dan LRA karena beda perhitungan dan pengakuan Pendapatan. Pada LO, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL tidak dihitung sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Pada LRA, LRA mengakui Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebagai Pendapatan.

Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk TA 2019 mengalami peningkatan 9,97 persen dibandingkan dengan TA 2018. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan jumlah sampel pengujian, jumlah peserta pelatihan, dan penerimaan pendapatan anggaran lain-lain.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp7.843.575.647

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.843.575.647 dan Rp7.916.746.069.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Total Beban Pegawai LO (Basis Akrual) diperoleh berdasarkan Total Belanja Pegawai LRA (Basis Kas) ditambah dengan Beban Yang Masih Harus Dibayar sehingga total nominalnya lebih besar.

Penurunan Beban Pegawai pada Tahun 2019 sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan Beban Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Beban Pegawai antara lain:

1. Terdapat 5 orang pegawai yang pensiun di tahun 2019.
2. Adanya mutasi pegawai dari Jabatan Fungsional Tertentu menjadi Jabatan fungsional umum yang berpengaruh terhadap nilai tunjangan jabatan.
3. Ada mutasi masuk 1 pegawai namun juga ada mutasi pindah 2 orang pegawai, sehingga secara keseluruhan terdapat pengurangan jumlah pegawai di Baristand Industri Banjarbaru pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,014,918,157	4,280,139,721	(6.20)
Belanja Lembur	20,509,000	20,718,000	(1.01)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3,808,148,490	3,615,888,348	5.32
Jumlah Belanja	7,843,575,647	7,916,746,069	(0.92)

Beban

Persediaan

Rp1.472.471.650

0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.472.471.650 dan Rp1.333.379.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Peningkatan Beban Persediaan pada TA 2019 sebesar 10,43 persen, disebabkan adanya peningkatan realisasi pada Beban Persediaan Konsumsi, dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Konsumsi pada TA 2018. Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	226,077,850	75,443,800	199.66
Beban Persediaan Bahan Baku	1,246,393,800	1,257,936,000	(0.92)
Jumlah Beban Persediaan	1,472,471,650	1,333,379,800	10.43

Beban Barang

dan Jasa

Rp2.429.155.242

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.429.155.242 dan Rp2.029.806.546. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Peningkatan Beban Barang dan Jasa TA 2019 sebesar 19,67 persen dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa TA 2018 disebabkan kenaikan pada realisasi diantaranya: Beban Keperluan Perkantoran, Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Langganan Listrik, Beban Langganan Telepon, Beban Sewa, Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian/Lembaga, Beban Jasa Lainnya dan Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan Mesin.

Beban Aset Ekstrakomtabel ini muncul dikarenakan nilai aset tidak memenuhi syarat untuk diakui dari segi nilai kapitalisasi (minimal Rp1.000.000). Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	614,946,037	441,804,461	39.19
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	183,619,600	187,957,000	(2.31)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,707,410	9,852,950	(31.92)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	219,030,000	229,242,000	(4.45)
Beban Barang Operasional Lainnya	15,598,800	15,600,000	(0.01)
Beban Bahan	491,054,350	249,697,359	96.66
Beban Honor Output Kegiatan	196,835,000	191,110,000	3.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,304,000	223,455,000	(86.89)
Beban Langganan Listrik	245,119,880	175,325,090	39.81
Beban Langganan Telepon	4,150,754	3,040,107	36.53
Beban Langganan Air	14,195,940	27,686,286	(48.73)
Beban Sewa	18,300,000	0	0.00
Jasa Profesi	33,415,000	36,710,000	(8.98)
Beban Jasa kepada BLU Dalam Satu Kementerian/Lembaga	33,100,000	29,100,000	13.75
Jasa Lainnya	314,349,271	205,733,793.0	52.79
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	9,429,200	3,492,500	169.98
Jumlah	2,429,155,242	2,029,806,546	19.67

- Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin antara lain:

No	BAST	Nama Alat	Jumlah	Nilai Per Buah (Rp)
1	063/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/III/2018 Tanggal 28 Maret 2019	Kursi Kerja	2 buah	962.500
2	-sda-	Kursi Laboratorium	2 buah	858.000
3	127/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/V/2018 Tanggal 27 Mei 2019	Hygrometer	5 buah	364.500
4	-sda-	Thermometer Digital	5 buah	250.800
5	-sda-	Stopwatch Digital	3 buah	149.600

6	-sda-	Alat Pengukur Ketebalan	1 buah	499.400
7	-sda-	Bunsen Burner	2 buah	500.500
8.	138/PPHPBJ/BPPI/ Baristand- Banjarbaru/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2019	FSP UPS EP FP600	1 unit	852.500

Bukti BAST ada pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Beban

Pemeliharaan

Rp854.485.983

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp854.485.983 dan Rp729.569.850. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Peningkatan beban pemeliharaan sebesar 17,12 persen disebabkan adanya peningkatan kebutuhan pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada TA 2019, sehingga realisasi beban pemeliharaan TA 2019 lebih tinggi dibandingkan TA 2018. Pada Tahun Anggaran ini Baristand Industri Banjarbaru memperbaiki beberapa ruangan yang ada di area kantor dan rumah dinas kepala balai serta jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki meningkat. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436,422,000	254,268,500	71.64
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,678,183	460,746,150	-11.73
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	11,385,800	14,555,200	-21.78
Jumlah	854,485,983	729,569,850	17.12

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp987.469.720*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp987.469.720 dan Rp805.599.431. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan Beban Perjalanan Dinas sebesar 22,58 persen, disebabkan oleh kenaikan biaya akomodasi perjalanan terutama tiket pesawat terbang yang terjadi sejak awal Tahun 2019 sampai saat ini. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	945,080,842	738,512,282	27.97
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	47,000,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24,388,878	20,087,149	0.00
Jumlah	987,469,720	805,599,431	22.58

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.623.313.167*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.623.313.167 dan Rp2.607.153.940.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 0,62 persen disebabkan adanya kenaikan penyusutan peralatan dan mesin yang disebabkan oleh bertambahnya peralatan dan mesin pada Tahun 2019. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,843,864,868	1,762,941,494	4.59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	779,448,299	839,467,276	-7.15
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	4,745,170	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,623,313,167	2,607,153,940	0.62

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak ada peningkatan maupun penurunan Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih disebabkan tidak adanya Piutang pada Sejak Tahun Anggaran 2018 sejak diberlakukannya pelunasan pembayaran dilakukan dimuka. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNBK	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp54.917.589*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah Rp54.917.589 dan Rp37.146.138. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	19,982,140	100.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	61,103,089	21,295,248	186.93
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(6,185,500)	(4,131,250)	49.72
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	54,917,589	37,146,138	47.84

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam ran Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa untuk TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	0	0	0.00
Pos Luar Biasa	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp32.614.379.686

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.614.379.686 dan Rp34.147.784.666.

Defisit LO

Rp13.019.588.760

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.019.588.760 dan Rp12.533.378.069. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang

Menambah/

Mengurangi

Ekuitas

Rp2.043.534.000

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.534.000 dan Rp0. Koreksi yang dilakukan pada penyesuaian nilai aset, nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan koreksi lain-lain dapat menambah/mengurangi ekuitas.

Berikut adalah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada Baristand Industri Banjarbaru:

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai

persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.534.000 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun Anggaran
2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp11.443.309.7
31*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.443.309.731 dan Rp10.999.973.089. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13,902,686,980
Diterima dari Entitas Lain	(3,190,877,249)
Transfer Masuk	731,500,000
Jumlah	11,443,309,731

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DKEL sebesar Rp13.902.686.980 sedangkan DDEL sebesar (Rp3.190.877.249).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp731.500.000.

Penurunan

E.5 Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas

Ekuitas

Rp3.619.813.02

9

Kenaikan / (Penurunan) Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(3.624.297.610) dan Rp(1.533.404.980).

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

Rp28.994.566.6

57

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.990.082.076 dan Rp32.614.379.686.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1. SK Pengelola DIPA

Selama Tahun Anggaran 2019, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru melakukan 1 (satu) kali revisi SK Pengelola DIPA. SK Pengelola DIPA tersebut yaitu :

- 1) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru No. 02-SK/BPPI/BRSBB/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, Pengelola DIPA di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru terdiri dari:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Budi Setiawan, ST., MM
Pejabat Pembuat Komitmen	: Saibatul Hamdi, S.Hut, MP Farida Hasanah, SE., MA
Pejabat Penandatangan SPM	: Aslan Prayudi, SE
Bendahara Pengeluaran	: Endang Gembirawati, AMd
Bendahara Penerimaan	: Siti Faridah, A.Md

- 2) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru No. 058-SK/BPPI/BRSBB/4/2019 tanggal 1 April 2019, Pengelola DIPA di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru terdiri dari:

Kuasa Pengguna Anggaran : Budi Setiawan, ST., MM
 Pejabat Pembuat Komitmen : Farida Hasanah, SE., MA
 Ratri Yuli Lestari, S.Hut., M.E
 Pejabat Penandatanganan SPM : Aslan Prayudi, SE
 Bendahara Pengeluaran : Endang Gembirawati, AMd
 Bendahara Penerimaan : Siti Faridah, A.Md

F.1.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebagai acuan pengelolaan anggaran merupakan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: SP DIPA-019.07.2.247232/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan PAGU Rp13.524.420.000.

Selama Triwulan Tahun Anggaran 2019, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru melakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA. Revisi DIPA tersebut yaitu :

NO	DIPA REVISI	TANGGAL	PAGU	KETERANGAN
1.	SP DIPA-019.07.2.247232/ 2018 R Revisi ke 01	17-01-2019	Rp13.524.420.000	Perubahan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, semula Ir. Lies Indriati menjadi Budi Setiawan. S.T., M.M.
2.	SP DIPA-019.07.2.247232/ 2018 R Revisi ke 02	11-3-2019	Rp13.524.420.000	Buka Blokir

3.	SP DIPA- 019.07. 2.2472 32/ 2018 R Revisi ke 03	19-3-2019	Rp13.524.420.000	Adanya perubahan kebutuhan belanja sehingga perlu dilakukan revisi DIPA
4.	SP DIPA- 019.07. 2.2472 32/ 2018 R Revisi ke 04	03-07-2019	Rp13.524.420.000	Adanya perubahan kebutuhan belanja sehingga perlu dilakukan revisi DIPA
5.	SP DIPA- 019.07. 2.2472 32/ 2018 R Revisi ke 05	28-10-2019	Rp13.992.240.000	Adanya perubahan anggaran kebutuhan belanja sehingga perlu dilakukan revisi DIPA
6.	SP DIPA- 019.07. 2.2472 32/ 2018 R Revisi ke 06	05-11-2019	Rp13.992.240.000	Adanya perubahan kebutuhan belanja sehingga perlu dilakukan revisi DIPA
7.	SP DIPA- 019.07. 2.2472 32/ 2018 R Revisi ke 07	22-11-2019	Rp13.992.240.000	Adanya perubahan kebutuhan belanja sehingga perlu dilakukan revisi DIPA

F.1.3 Revaluasi Barang Milik Negara

Kegiatan Revaluasi BMN merupakan arahan dari Menteri Keuangan untuk memperoleh nilai kekayaan negara yang terupdated sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Re-revaluasi BMN pada tahun 2019 atas revaluasi yang sudah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 dilaksanakan sebagai tindak lanjut LHP BPK RI Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 Pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga Selaku Pengguna Barang, Dan Instansi Terkait Lainnya. Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru selaku Satker di bawah Kementerian Perindustrian telah melaksanakan Re-revaluasi BMN pada tahun 2019 dengan mengajukan formulir isian revaluasi beserta data dukung ke KPKNL Banjarmasin.

Proses revaluasi yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sudah pada tahap penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian dengan nomor : BAR-486/REV/WKN.12/KNL.03/2019 oleh KPKNL Banjarmasin, namun masih untuk aset tetap berupa tanah, sedangkan untuk revaluasi atas aset tetap berupa bangunan gedung akan dilaksanakan pada tahun 2020. Revaluasi atas aset tetap berupa tanah yang dilaksanakan Tahun 2019 pada Baristand Industri Banjarbaru terdapat mutasi tambah sebesar Rp 271.921.000 dan mutasi kurang sebesar Rp 2.315.455.000 sehingga secara kumulatif terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.043.534.000 yang kemudian harus di catat sebagai koreksi atas penilaian aset tetap.

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR